

**Perguruan Tinggi Islam Di Indonesia:
Tantangan & Peluang di Masa Depan
(Studi Tantangan dan Peluang Perguruan Tinggi Islam di Era
Masyarakat Ekonomi ASEAN)**

**Abdul Hayyi Akrom
Ahmad Hulaimi**
(Dosen Institut Agama Islam Hamzanwadi NW Pancor)

Abstrak

Tulisan ini berupaya membahas tema yang lebih spesifik, yakni tantangan dan peluang pendidikan tinggi Islam Indonesia di era MEA. Khususnya pada isu tantangan dan peluang perguruan tinggi Islam masa depan.

Tantangan sekaligus peluang terbuka bagi perguruan tinggi Islam saat ini adalah era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sepertinya luput dari perhatian banyak pihak, termasuk pemangku kebijakan perguruan tinggi Islam. MEA sendiri telah disahkan pelaksanaannya sejak 1 Januari 2016 lalu. Namun sampai saat ini, kebijakan mengenai perguruan tinggi Islam berfokus pada persoalan internal dan belum mengarah pada respon mengenai eksistensi perguruan tinggi Islam di era MEA. Kajian ini menjadi penting untuk melihat tantangan dan peluang perguruan tinggi Islam Indonesia di era MEA, kini dan di masa mendatang.

MEA sendiri, jika dilihat di satu sisi bisa menjadi peluang sekaligus tantangan bagi perguruan tinggi Islam di Indonesia. Tantangan dalam bentuk mutu lulusan, sarana prasarana, problem ketenagaan Perguruan Tinggi Islam masih menjadi tantangan bagi kemajuan bagi Perguruan Tinggi Islam. Membutuhkan keterbukaan pemikiran, perluasan visi misi dan peningkatan mutu ketenagaan, serta skill lulusan bagi perguruan tinggi Islam sebagai jalan untuk eksis dan menjadi pilihan dan prioritas Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Kata Kunci: Tantangan, Perguruan Tinggi Islam, MEA

A. Konteks Masalah Perguruan Tinggi Islam

Keberadaan perguruan tinggi Islam telah turut aktif dalam mewarnai dinamika pendidikan nasional di Tanah Air. Sebagaimana diketahui, perguruan tinggi Islam telah ada dan eksis sejak masa-masa awal kemerdekaan. Artinya perguruan tinggi Islam telah aktif mengiringi perjalanan bangsa Indonesia.

Kelahiran perguruan tinggi Islam di Indonesia tidak terlepas dari aspirasi umum Islam yang pada mulanya didorong oleh beberapa tujuan, di antaranya: *pertama*, untuk melakukan pengkajian dan pengembangan ilmu-ilmu agama Islam pada tingkat yang lebih tinggi secara sistematis dan terarah, *kedua*, untuk pengembangan dakwah Islam, *ketiga*, untuk kaderisasi ulama di berbagai bidang.¹

Meski telah melewati perjalanan panjang, perguruan tinggi Islam di Indonesia banyak menghadapi tantangan sekaligus peluang. Tantangan dan peluang ini telah ada sejak dulu, saat ini dan lebih-lebih pada perjalanannya di masa mendatang. Sampai saat ini, perguruan tinggi Islam memiliki problem-problem yang terus menjadi isu yang menyertai dinamika perjalanannya. Menurut Husni Rahim, perguruan tinggi di Indonesia, termasuk IAIN dan perguruan tinggi Islam lainnya, masih jauh dari siap dalam menghadapi kompetisi berskala regional, apalagi internasional, karena masih jauh dari berkualitas².

Sarana prasarana, mutu lulusan, ketenagaan, keilmuan adalah pekerjaan-pekerjaan besar perguruan tinggi Islam yang mendesak untuk diselesaikan. Lebih-lebih di era yang sudah sangat terbuka, baik pada tingkat regional (MEA) dan internasional (globalisasi).

¹ Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, (Bandung, Nuansa, 2010), 272.

² Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Logos, 2001), 185.

Sebagaimana uraian di atas, di antara tantangan dan peluang perguruan tinggi Islam saat ini dan akan mengikuti perjalanannya adalah globalisasi, baik pada level kawasan (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dan internasional. MEA dan globalisasi dalam pandangan penulis menjadi tantangan sekaligus peluang bagi eksistensi perguruan tinggi Islam di Indonesia. Setuju atau tidak setuju, keberadaan perguruan tinggi Islam di Indonesia dipaksa untuk kompetitif tidak hanya antar perguruan tinggi Islam dengan perguruan tinggi umum di Tanah Air. Tetapi juga langsung dengan perguruan tinggi yang ada di negara-negara ASEAN pada khususnya, dan dunia pada umumnya.

Terkait dengan hal di atas, ada tiga tantangan serius sekaligus peluang yang dihadapi oleh perguruan tinggi Islam di Indonesia dalam konteks kompetisi kawasan dan internasional, yaitu: isu mutu lulusan, sarana dan prasarana dan isu sumber daya manusia perguruan tinggi Islam di Indonesia.

Isu mutu lulusan menjadi sangat penting saat ini. Bahkan di banyak negara maju, mutu lulusan perguruan tinggi telah menjadi isu lama dan telah ditempuh berbagai cara untuk mengatasinya. Termasuk riset intensif perguruan tinggi luar negeri mengenai lulusan mereka. Kontrak-kontrak dan jalinan kerjasama dengan dunia kerja, promosi, pengetatan aturan-aturan akademik dalam perkuliahan adalah di antara langkah yang ditempuh untuk mengatasi masalah mutu lulusan.³

Perguruan tinggi Islam Indonesia sebagai bagian dari perguruan tinggi di dunia perlu melihat langkah-langkah penting yang pernah dilaksanakan oleh perguruan tinggi yang telah maju dalam upaya peningkatan mutunya. Hal ini menjadi penting, agar perguruan tinggi Islam tetap dapat eksis dan tidak ditinggalkan. Bahkan perlu visi misi besar dan kebijakan, agar perguruan tinggi Islam di Indonesia menjadi

³ Kym Fraser, *Education Development and Leadership in Higher Education*, (London, RoutledgeFalmer, 2005), 165.

pilihan dan prioritas utama Masyarakat Ekonomi ASEAN pada masa kini dan mendatang.

Dari uraian di atas mengenai dinamika perguruan tinggi Islam di Indonesia dengan berbagai isu yang menyertainya dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN dan internasional telah menjadi isu penting yang mendesak untuk jawab dan dicari solusinya. Sebab itu, agar pembahasan ini tetap fokus terhadap tema yang dibahas, penulis mengarahkan pembahasan dalam sub-sub pertanyaan berikut ini: bagaimana keberadaan pendidikan tinggi Islam di Indonesia di era MEA kini dan yang akan datang?. Serta isu-isu apa saja yang menyertai pendidikan tinggi Islam di Indonesia di era MEA?

B. Gambaran dan Tantangan Perguruan Tinggi Islam Indonesia di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN

Pada konteks domestik, secara umum, baik perguruan tinggi umum dan perguruan tinggi Islam memiliki masalah yang sama di dalam negeri. Yakni berkaitan dengan mutu lulusan yang kerap dipandang belum mampu beradaptasi dengan pasar kerja di Tanah Air. Fakta lapangan menunjukkan, angka pengangguran lulusan perguruan tinggi masih tergolong tinggi di Tanah Air. Melalui pemberitaan Harian Tempo (04/05/2016), Kepala Pusat Statistik (BPS), Suryamin mengatakan, bahwa pada bulan Februari 2016, tingkat pengangguran terbuka mencapai angka 5,5 persen atau 7,02 juta orang⁴.

Secara khusus, jumlah pengangguran yang berasal dari bangku perguruan tinggi (universitas) mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni dari 5,34 persen menjadi 6,22 persen⁵. Karena itu, keadaan ini kerap mendapat kritikan dari berbagai pihak. Tidak jarang kritik itu ditujukan langsung pada perguruan tinggi yang telah meluluskan sarjana. Dalam hal ini, berkaitan dengan mutu lulusan, perguruan tinggi kerap dipandang belum mampu meluluskan sarjana yang siap pakai dan tangkas dalam pekerjaan yang dibutuhkan oleh dunia kerja di Tanah Air.

⁴ www.tempo.com/04/05/2016. Diunduh 27/03/2017.

⁵ Ibid

Bagaimana dengan lulusan pendidikan tinggi Islam? Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu dicatat, bahwa perguruan tinggi Islam di Indonesia masih dijadikan pilihan kedua oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.⁶ Situasi dan mutu lembaga pendidikan Islam saat ini masih belum menggembirakan. Secara empiris pendidikan tinggi Islam di Indonesia masih dijadikan pilihan kedua oleh sebagian masyarakat.

Selama ini lulusan perguruan tinggi Islam sering dipandang tidak memiliki pasar kerja yang luas. Lulusan perguruan tinggi Islam hanya mampu mengisi kantor yang berada di bawah Koordinasi Kementerian Agama dan madrasah-madrasah. Karena itu, situasi ini membuat pihak Kementerian Agama berusaha keras untuk menyesuaikan diri dalam keadaan tersebut. Artinya persoalan relevansi lulusan perguruan tinggi Islam menjadi salah satu masalah yang tidak ringan⁷.

Lebih-lebih di era MEA seperti saat ini, meniscayakan lembaga perguruan tinggi Islam untuk turut aktif menghubungkan diri dengan keilmuan dan kebutuhan yang sedang berkembang di masyarakat global⁸. Artinya perguruan tinggi Islam perlu membuat langkah-langkah dan terobosan dalam rangka menghubungkan diri dengan interaksi keilmuan masyarakat global. Minimal di kawasan MEA.

Sebagai payung hukum regulasi perguruan tinggi Islam, dalam undang-undang nomor 12 tahun 2012 sebagai salah satu dasar penyelenggaraan perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Islam di Indonesia, pada pasal 7 ayat 4 berbunyi: dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggungjawab, tugas, wawenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang agama.

⁶ Mansur Isna, *Pendidikan Islam Untuk Perguruan Tinggi (Diskursus Pendidikan Islam)*, (Gobal Pustaka, Yogyakarta, 2009), 6.

⁷ Ibid, hal 25.

⁸ Peter McCaffery, *The Higher Education Manager's*, (London, RoutledgeFalmer, 2004), 12.

Dari penjelasan di atas, berkaitan dengan pembuat regulasi, Kementerian Agama melalui Dirjen Pendidikan Tinggi Islam adalah pihak utama dalam pembuatan regulasi yang dalam rangka meningkatkan mutu dan eksistensi pendidikan tinggi Islam di Tanah Air.

Karena itu, berkaitan dengan mutu, maka Kemenertian Agama dalam upaya meningkatkan mutu lulusan perguruan tinggi Islam, tentu tidak bisa lagi hanya dengan melihat lulusan perguruan tinggi Islam dan umum lainnya di Tanah Air. Tetapi juga dengan melihat standar mutu perguruan tinggi dari negara-negara yang tergabung dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Keadaan yang menimpa pendidikan tinggi Islam perlu dicermati oleh banyak pihak, lebih-lebih Kementerian Agama terkait dengan eksistensi perguruan tinggi Islam dalam merekonstruksi program perencanaan dan pengembangan untuk menyongsong masa depan perguruan tinggi Islam itu sendiri.

Beberapa problem yang menjadi isu di perguruan tinggi Islam Indonesia saat ini, yaitu:

Pertama, mutu lulusan. Lulusan selalu menjadi sorotan bagi perguruan tinggi. Termasuk perguruan tinggi Islam tentunya. Lebih-lebih pada pandangan masyarakat yang lebih pragmatis, serapan lulusan sebuah perguruan tinggi Islam sering dijadikan sebagai standar keunggulan sebuah perguruan tinggi. Semakin tinggi daya serap lulusan perguruan tinggi, maka semakin baik perguruan tinggi tersebut. Begitu juga sebaliknya. Karena garapan keilmuan perguruan tinggi Islam masih dominan pada ilmu-ilmu ke-Islaman dan humaniora menjadi salah satu penyebab kurang luasnya cakupan lulusan perguruan tinggi Islam dalam dunia kerja. Sehingga hal ini melahirkan kesan, bahwa lulusan perguruan tinggi Islam memiliki pasar kerja yang sempit.

Kedua, problem sarana dan prasarana. Tentu tidak adil membandingkan sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi umum dengan yang ada di perguruan tinggi Islam di Indonesia. Lebih-lebih pada perguruan tinggi Islam yang swasta. Meski tidak semuanya, namun secara umum, terdapat kesenjangan yang amat mencolok antara sarana dan prasarana yang ada di perguruan tinggi umum dengan yang ada di perguruan tinggi Islam. Hanya ada beberapa perguruan tinggi Islam yang sarana dan prasarana sudah baik, khususnya pada perguruan tinggi Islam negeri yang sudah menjadi universitas, seperti Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Negeri Sultan Alauddin Makassar.

Ketiga, problem ketenagaan. Masalah serius lainnya yang mengikuti perjalanan perguruan tinggi Islam di Indonesia adalah ancaman kekurangan guru besar. Meski dalam beberapa tahun terkakhir, sudah banyak dosen-dosen perguruan tinggi Islam yang sudah berkualifikasi doktor, namun masih sangat timpang jika dibanding dengan kualifikasi pendidikan dosen di perguruan tinggi umum. Bahkan, ada perguruan tinggi Islam negeri, tidak memiliki guru besar⁹.

Sebagaimana diketahui, bahwa bangsa Indonesia merupakan salah satu pendiri ASEAN (*Association Of Southeast Asian Nations*). Seperti di awal tulisan ini, bahwa sejak 01 Januari 2016 kemarin, perguruan tinggi Islam mengalami satu era baru yang tidak pernah terjadi pada tahun sebelumnya. Yakni menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA sendiri dapat dipahami sebagai salah satu bentuk perluasan kerja sama 10 (sepuluh) negara ASEAN yang semula sebagai sebuah organisasi geo-politik dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara

⁹ Wawancara dengan Abdul Hadi, Pengkaji Islam Lombok, tanggal 15 Maret 2017.

menjadi kawasan integrasi ekonomi negara anggota ASEAN. Dengan kata lain, sebagai pelaksanaan pasar bebas di kawasan Asia Tenggara.

Era MEA sendiri merupakan bentuk globalisasi kawasan. Aliran lintas batas negara terhadap teknologi, ekonomi, pengetahuan, orang, nilai, ideologi dan berbagai macam hal lainnya yang membawa dampak yang berbeda terhadap sejarah, tradisi, kebudayaan, sumber daya dan prioritas kebijakan-kebijakan negara-negara di dunia¹⁰.

Era MEA ini tentu akan memberi pengaruh besar terhadap eksistensi perguruan tinggi Islam di tanah air. Era baru ini akan memiliki dampak, baik langsung atau tidak langsung terhadap perkembangan pendidikan tinggi Islam. Karena itu, MEA perlu menjadi salah satu pertimbangan penting pembuat kebijakan dalam rangka meningkatkan mutu dan eksistensi perguruan tinggi Islam di Tanah Air. Di antaranya adalah problem krusial berupa isu lulusan, sarana prasana dan ketenagaan yang perguruan tinggi Islam di Tanah Air.

C. Peluang Perguruan Tinggi Islam di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN

Peluang Kementerian Agama dalam memajukan pendidikan Islam sangat terbuka. Sebab hal ini dijamin oleh undang-undang yang menjadi payung besar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, bagian keempat, pasal 19 ayat 2 mengatakan, bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.¹¹ Pendidikan Tinggi Islam dapat dan berpeluang untuk diarahkan pengelolaannya secara terbuka untuk mencapai kemajuannya.

MEA sendiri merupakan suatu keadaan yang membawa bangsa Indonesia secara ekonomi dan beberapa bidang yang lain terintegrasi

¹⁰ Hanief Saha Ghafur, *Manajemen Mutu, Penjaminan & Internalisasi Perguruan Tinggi di Indonesia*, (Jakarta, UI Press, 2009), 13.

¹¹ Undang-Undang SISDIKNAS Beserta Penjelasannya, (Bandung, Citra Umbara, 2003), 14.

menjadi satu dalam satu kawasan, yakni ASEAN¹². Secara singkat, pasar ekonomi MEA memberi peluang bagi bangsa Indonesia untuk memasarkan apa yang dimiliki, termasuk ilmu pengetahuan lulusan perguruan tinggi Islam menjadi terbuka dan memiliki peluang yang sama dengan bangsa ASEAN lainnya.

Begitu juga dengan warga negara yang lain, seperti Malaysia, Singapura, Thailand memiliki peluang sama di Indonesia dalam bidang ekonomi dan berapa bidang lainnya. Jika sebelumnya, kita hanya bersaing dengan sesama putra bangsa antar daerah di Tanah Air, maka kini persaingan lebih besar, yakni sesama penduduk ASEAN. Termasuk untuk para lulusan perguruan tinggi Islam.

Karena itu, perguruan tinggi Islam, dalam upaya untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitasnya perlu untuk ditingkatkan partisipasi semua elemennya¹³. Mutu lulusan dan perluasan bidang ilmu menjadi hal yang sangat penting bagi lulusan perguruan tinggi Islam di era MEA. Dengan mutu yang baik, pastinya perguruan tinggi Islam akan dapat survive di era kini dan masa mendatang. Karena itu, perlu sikap proaktif dari Kementerian Agama terhadap perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta untuk membuat regulasi-regulasi yang mengarah pada upaya mutu yang akan mengantarkan perguruan tinggi Islam dapat eksis, bahkan menjadi unggul di era MEA.

Sampai saat ini, Kementerian Agama telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada lingkup yang luas dan mulai banyak menyentuh persoalan mutu. Salah satu contohnya adalah Peraturan Menteri Agama RI Nomor 15 tahun 2014 tentang perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan. Bahwa bahwa perguruan tinggi keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah perguruan tinggi

¹² http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Ekonomi_ASEAN, diakses 16 Maret 2017.

¹³ Fathul Jannah, *Manajemen Akademik Lembaga Pendidikan Tinggi Islam*, (Yogyakarta, Safiria Insani Press, 2009), 30.

yang didirikan dan / atau diselenggarakan oleh pemerintah dan / atau masyarakat di bawah pembinaan Kementerian Agama.

Meski payung hukum untuk mencapai mutu sudah ada. Seperti peraturan di atas, maka peluang perguruan tinggi Islam untuk melakukan perubahan menjadi sangat terbuka dengan menjadikan peraturan menteri nomor 15 tahun 2014 tentang perubahan bentuk perguruan tinggi keagamaan, yaitu untuk meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

Perubahan status perguruan tinggi Islam di Tanah Air menjadi penting dalam rangka perluasan bidang ilmu dan memperluas pengaruh dan kontribusi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh perguruan tinggi Islam itu sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi banyak perubahaan status pada perguruan tinggi Islam. Dari bentuk sekolah tinggi menjadi institut, dan dari institut menjadi universitas. Untuk PTAIN sendiri, dalam proses transpormasinya, telah menjelma menjadi 7 Universitas Islam Negeri, 15 Institut Agama Islam Negeri, 34 Sekolah Tinggi Negeri¹⁴.

Peluang perguruan tinggi Islam dalam bentuk perluasan ilmu dan kajian menjadi penting untuk terus dilakukan. Seperti kebijakan pemerintah yang terbaru pada tahun 2017, yaitu peresmian 6 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) berdasarkan peraturan presiden (Perpres) RI, yaitu Perpres nomor 34 tahun 2017 tentang UIN Mataram, Perpres nomor 35 tahun 2017 tentang UIN Imam Bonjol, Pandang, Perpres nomor 36 tahun 2017 tentang UIN Antasari Banjarmasin, Perpres nomor 37 tahun 2017 UIN Sultan Thaha Jambi, Perpres nomor 38 tahun 2017 UIN Raden Intan Lampung, dan Perpres nomor 39 tahun 2017 tentang UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten¹⁵.

¹⁴ Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU SISDIKNAS*, (Jakarta, Rajawali Press, 2013), 189.

¹⁵ www.jejakrekam.com, diakses tanggal 15 Maret 2017.

Apa yang dilakukan oleh perguruan tinggi Islam untuk menghadapi era MEA? Yaitu mempercepat mengatasi masalah lulusan, sarana dan prasarana dan ketenagaan, menurut penulis ada tiga hal yang perlu ada pada perguruan tinggi Islam, yaitu:

Pertama, perlu keterbukaan pemikiran pada perguruan tinggi Islam, baik negeri maupun swasta. Perguruan tinggi Islam penting untuk membuka pemikiran dalam rangka menghadapi MEA. Bukan lagi saatnya mengambil bagian bergelut dalam perdebatan setuju atau tidak mengenai MEA. Perguruan tinggi Islam di Tanah Air perlu mengikuti keputusan pemerintah, bahwa MEA adalah keputusan bersama negara ASEAN yang telah dilaksanakan kesepakatannya oleh pemerintah. Sehingga yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan mutu lulusan secara baik untuk dapat menjadi pelaku dalam implementasi MEA di masa kini dan mendatang.

Kedua, Perguruan tinggi Islam perlu melakukan perluasan visi dan cita-cita lembaga. Sebagai masyarakat ASEAN, perguruan tinggi Islam perlu menyusun sesuatu yang baru dalam pengembangannya. Apapun statusnya, baik negeri dan swasta perguruan tinggi Islam hendaknya dilengkapi dengan visi sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sehingga interaksi mutu dan lulusannya tidak hanya berkuat pada level dalam daerah dan dalam negeri saja, tetapi lintas negara.

Ketiga, Penambahan skill lulusan perguruan tinggi Islam. Setiap negara pasti sudah menyiapkan diri untuk menghadapi persaingan itu. Perguruan tinggi Islam di Indonesia perlu upaya serius untuk menambahkan skill lulusan dalam hidup sehingga apa yang menjadi kebutuhan MEA dapat diisi oleh masyarakat (lulusan perguruan tinggi Islam).

Persoalan lulusan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh perguruan tinggi Islam di Tanah Air. Kekuatan, kemampuan, ketahanan, dan kelenturan sosok-sosok lulusan lembaga

pendidikan Islam, dalam merespon dan beradaptasi dengan konstelasi sosial, ekonomi, politik, dan teknologi dalam perkembangan dunia modern dewasa ini menjadi indikator utama keberhasilan pendidikan Islam dalam melakukan reposisi, reorientasi dan refungsionalisasi diri¹⁶.

Penulis sangat yakin, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh perguruan tinggi Islam di Tanah Air di era MEA, mulai dari masalah lulusan, sarana, prasarana dan ketenagaan dapat diselesaikan melalui partisipasi perguruan tinggi Islam itu sendiri dan kebijakan-kebijakan produktif lainnya dari pembuat kebijakan. Sehingga perguruan tinggi Islam di Tanah Air dapat hadir dan menjadi tujuan, serta prioritas Masyarakat Ekonomi ASEAN pada masa kini dan mendatang sebagai tempat mengkaji berbagai disiplin ilmu pengetahuan.

D. Kesimpulan

Peningkatan mutu lulusan, sarana prasarana dan ketenagaan perguruan tinggi Islam merupakan hal mendesak yang harus segera diatasi. Era MEA sejak 01 Januari 2016 lalu adalah tantangan sekaligus peluang bagi perguruan tinggi Islam untuk bersaing dengan perguruan tinggi di berbagai negara ASEAN. Perluasan bidang ilmu pada perguruan tinggi Islam melalui kebijakan pemerintah sangat penting dilakukan sebagai salah satu bentuk perluasan lulusannya dalam rangka survive di era MEA.

Perguruan tinggi Islam perlu mengambil tanggung jawab lebih untuk meningkatkan mutunya dengan standar minimal ASEAN, dalam rangka pemberdayaan masyarakat menghadapi era baru ini. Hal ini penting dilakukan, agar perguruan tinggi Islam Indonesia menjadi salah satu lembaga Islam yang berkontribusi besar terhadap kemandirian masyarakat menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, serta mampu tampil menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam minimal di kawasan ASEAN.

¹⁶ Azyumardi Azra (dalam Nurhayati Djamas), *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, (Jakarta, Rajawali Press, 2009), 10.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Soebahar, *Kebijakan Pendidikan Islam Dari Ordonansi Guru Sampai UU SISDIKNAS*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Azyumardi Azra (dalam Nurhayati Djamas), *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Fathul Jannah, *Manajemen Akademik Lembaga Pendidikan Tinggi Islam*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2009.
- Husni Rahim, *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos, 2001.
- Hanief Saha Ghafur, *Manajemen Mutu, Penjaminan & Internalisasi Perguruan Tinggi di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Kym Fraser, *Education Development and Leadership in Higher Education*, London: RoutledgeFalmer, 2005.
- Mansur Isna, *Pendidikan Islam Untuk Perguruan Tinggi (Diskursus Pendidikan Islam)*, Yogyakarta: Gobal Pustaka, 2009.
- Mudjia Rahardjo, *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*, Malang: UIN-MALIKI Press, 2010.
- Muhaimin, *Arah Baru Pengembangan Pendidikan Islam*, Bandung: Nuansa, 2010.
- Peter McCaffery, *The Higher Education Manager's*, London: RoutledgeFalmer, 2004.
- Undang-Undang SISDIKNAS Beserta Penjelasannya, Bandung: Citra Umbara, 2003.

Sumber Internet

www.tempo.com/04/05/2016. Diunduh 27/03/2017.

http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat_Ekonomi_ASEAN, diakses 16 Maret 2017.

www.jejakrekam.com, diakses tanggal 15 Maret 2017.

Sumber Wawancara

Wawancara dengan Abdul Hadi, Pengkaji Islam Lombok, tanggal 15 Maret 2017.